

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Komunikasi Politik

Komunikasi politik pada dasarnya merupakan bagian dari, dan dipengaruhi oleh budaya politik suatu masyarakat. Pada saat yang sama komunikasi politik juga dapat melahirkan, memelihara, dan mewariskan budaya politik, sehingga dengan memperhatikan struktur pesan serta pola-pola komunikasi politik yang diperankannya, maka dapat dianalisis budaya politik suatu masyarakat. Menurut Rush dan Althoff (1997), komunikasi politik – transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dengan sistem politik – merupakan unsur dinamis suatu sistem politik, dan proses sosialisasi, partisipasi, serta rekrutmen politik bergantung pada komunikasi.¹⁶

Dari proses politik seperti itu, terlihat kemudian posisi penting komunikasi politik terutama sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan yang dapat memfungsikan kekuasaan. Proses ini berlangsung di semua tingkat masyarakat dan setiap tempat yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu-

¹⁶ Atwar Bajari & S. Sahala Tua Saragih, *Komunikasi Kontekstual Teori Dan Praktik Komunikasi Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 413.

individu dengan kelompok-kelompoknya, bahkan di antara anggota masyarakat dengan para penguasanya. Sebab dalam kehidupan bernegara, setiap individu memerlukan informasi terutama mengenai kegiatan masing-masing pihak menurut fungsinya. Pemerintah membutuhkan informasi tentang kegiatan rakyatnya, dan sebaliknya rakyat juga harus mengetahui apa yang dikerjakan oleh pemerintahnya.

Itulah sebabnya, Susanto (1985) mendefinisikan komunikasi politik sebagai “komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama.” Menurut Kantraprawira, komunikasi politik berguna untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intragolongan, institut, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan.¹⁷

Kegiatan komunikasi politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari proses politik nasional yang menjadi latar kehidupan. Komunikasi politik di Indonesia secara umum masih diwarnai oleh watak *eufemisme* dalam beberapa hal dapat menghambat keterbukaan. *Eufemisme* memang tidak selalu berarti menutup-nutupi atau “menghaluskan”, karena merupakan bagian dari santun berkomunikasi yang ada pada setiap masyarakat. Praktik *eufimisme* sering

¹⁷ *Ibid*, hlm. 414.

berkomunikasi ini masih banyak dilakukan para politisi produk Pemilihan Umum (Pemilu) pada era reformasi. Mereka masih berbicara lantang ketika mengontrol pemerintahan, tetapi masih malu-malu untuk berbicara langsung mengenai keinginan untuk berkuasa.

Komunikasi politik adalah pertukaran informasi antara elite politik bangsa media dengan warga Negara. Istilah kunci dalam komunikasi politik: simbol-simbol politik dan bahasa, elite pers, publik, proses politik, efek potensial dan aktual, regulasi konflik dan fungsi sistem politik (Sharon E. Jarvis dan Soo Hye Han, dalam Sumartias, 2009).

a. Budaya Politik Indonesia

Pemikiran dan tingkah laku politik masyarakat Indonesia yang multietnis ini sebenarnya bukan dipengaruhi oleh campuran nilai budaya berbagai suku bangsa. Sebaliknya, yang benar-benar mempengaruhi hanya nilai beberapa suku bangsa. Di antara beberapa suku bangsa yang sangat berpengaruh ini, cara berpikir dan beberapa pola hidup suku Jawa kelihatan paling dominan, walaupun rupanya sekali-kali ada desakan suku bangsa lain.

Konstatasi sementara tentang budaya politik Indonesia, yang tentunya harus ditelaah dan dibuktikan lebih lanjut, adalah pengamatan tentang variable sebagai berikut (Kantaprawira, 2004: 37-39)

1. Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India, misalnya, yang menghadapi perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan/rentan.
2. Budaya politik Indonesia yang bersifat parokhial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di lain pihak, di satu segi massa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya – yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, ikatan primordial – sedangkan di lain pihak kaum elitinya sungguh-sungguh merupakan partisipan yang aktif - yang kira-kira disebabkan oleh pendidikan modern (Barat) – kadang-kadang bersifat sekuler dalam arti relatif dapat membedakan faktor-faktor penyebab disintegrasi, seperti agama, kesukuan, dan lain-lain.
3. Sifat ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukuan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu: *puritanisme* dan *nonpuritanisme*, dan lain-lain. Di samping itu, salah satu petunjuk masih kukuhnya ikatan tersebut dapat dilihat dari pola budaya politik yang tercermin dalam struktur vertikal masyarakat di mana usaha gerakan kaum elite (dalam hal ini organisasi politik) langsung

mengeksploitasi dan menyentuh subkultur sosial dan subkultur untuk tujuan perekrutan dukungan.

4. Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhkan sikap paternalisme dan sifat primordial, sebagai indikatornya dapat disebutkan antara lain bapakisme, sikap asal bapak senang. Di Indonesia budaya politik tipe parokial kaula lebih mempunyai keselarasan untuk tumbuh dengan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan atau menundukkan diri pada proses *output* (keluaran) penguasa.
5. Dilema interaksi tentang introduksi modernisasi (dengan segala konsekuensinya) dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat.¹⁸

Bentuk Budaya Politik

Menurut David Apter, memberi gambaran tentang kondisi politik yang menimbulkan suatu agama politik di suatu masyarakat merupakan kondisi politik yang terlalu sentralistis dengan peranan birokrasi atau militer yang terlalu kuat. Budaya politik para elite berdasarkan budaya politik agama tersebut dapat mendorong atau menghambat pembangunan, karena masyarakat harus menyesuaikan diri pada kebijaksanaan para elite politik.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm. 418-419.

¹⁹ Syahril Syarbaini, dkk, *Pengertian Dasar Ilmu Politik* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 122

Berdasarkan sikap, nilai-nilai, informasi, dan kecakapan politik yang dimiliki, kita dapat digolongkan orientasi-orientasi warga Negara terhadap kehidupan politik dan pemerintahannya. Orang yang melibatkan diri dalam kegiatan politik, sekurangnya dalam pemberian suara (*voting*) dan mencari informasi tentang kehidupan politik dapat dinamakan dengan budaya politik partisipan, sedangkan secara pasif, patuh kepada pemerintah dan undang-undang dengan tidak ikut pemilu disebut budaya politik subjek. Golongan ketiga adalah orang-orang yang sama sekali tidak menyadari adanya pemerintahan dan politik disebut budaya politik parochial.

Berdasarkan penggolongan di atas, terdapat tiga model dalam kebudayaan politik. *Pertama*, masyarakat demokratis industrial dengan jumlah partisipan mencapai 40-60 % dari penduduk dewasa. Dalam sistem ini, cukup banyak aktivis politik untuk menjamin adanya kompetisi partai-partai politik dan kehadiran pemberian suara yang besar. *Kedua*, model sistem otoriter, di sini jumlah industrial dan modernis hanya sebagian kecil, meskipun terdapat organisasi politik dan partisipan politik, seperti mahasiswa dan kaum intelektual dengan tindakan persuasif menentang sistem yang ada, tetapi sebagian besar jumlah rakyat hanya menjadi subjek yang pasif. *Ketiga*, sistem demokratis pra-

industrial dalam hanya terdapat sedikit sekali partisipan dan sedikit pula keterlibatannya kepada pemerintahan.²⁰

b. Proses dan Unsur Komunikasi Politik

Tidak dapat di pungkiri bahwa komunikasi adalah salah satu bentuk kegiatan umat manusia yang paling penting. Tidak ada manusia yang tidak menjalankan komunikasi karena komunikasi adalah lambang dari dinamika kehidupan di dalam masyarakat. Dari sudut pandang ini, komunikasi dilihat dalam pengertiannya yang umum dan luas, yakni hubungan dan interaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Interaksi itu terjadi karena seseorang menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk lambang-lambang tertentu yang diterima pihak lain yang menjadi sasarannya. Sehingga sedikit banyak memengaruhi sikap dan tingkah laku pihak yang dimaksud. Sebagai anggota masyarakat manusia melakukan hal ini secara terus menerus kadang-kadang bahkan tanpa sadar termasuk anggota masyarakat yang tidak mengerti arti konsep “komunikasi”. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa komunikasi adalah kegiatan yang senantiasa dilakukan oleh semua anggota masyarakat dimanapun dan kapanpun.

Proses komunikasi yang dilakukan dalam interaksi antar manusia terdapat dalam berbagai dimensi kehidupan. Lingkup komunikasi juga menembus dimensi politik. Dalam kehidupan

²⁰ *Ibid*, hlm. 123.

sehari-hari, proses komunikasi diawali oleh sumber (*source*) baik individu maupun kelompok yang berusaha berkomunikasi dengan individu atau kelompok lain.

Proses komunikasi politik merupakan rangkaian dari aktivitas penyampaian pesan politik sehingga diperoleh *feedback* dari penerima pesan. Dari proses komunikasi, akan timbul proses, model/bentuk dan juga bagian-bagian kecil yang berkaitan erat dengan proses komunikasi. Menurut Burhan Bugin dalam buku “Sosiologi Komunikasi” ada beberapa tahap dalam proses komunikasi:²¹

- a. *Ideation*, yaitu penciptaan suatu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi untuk dikomunikasikan. Tahap *pertama* yang dilakukan sumber dalam proses komunikasi adalah *Ideation*, ini merupakan landasan bagi suatu pesan yang akan disampaikan. Seorang komunikator politik dapat memilih dan menciptakan pesan dengan menggunakan ide untuk mempengaruhi komunikannya.
- b. *Encoding*, dalam penciptaan suatu pesan, yaitu sumber menerjemahkan informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda atau lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi dan diharapkan mempunyai efek terhadap orang lain. Pesan adalah alat-alat dimana sumber

²¹ Burhan Bugin, *Sosiologi Komunikasi Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 255-256.

mengekspresikan gagasannya dalam bentuk bahasa lisan, bahasa tertulis ataupun perilaku non verbal, seperti bahasa isyarat, ekspresi wajah, atau gambar-gambar.

- c. Langkah ketiga dalam proses komunikasi adalah penyampaian pesan yang telah sandi (*encode*). Sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan cara berbicara, menulis, menggambar, ataupun melalui suatu tindakan tertentu. Pada langkah ketiga ini, kita mengenal istilah *channel* atau saluran, yaitu alat-alat untuk menyampaikan suatu pesan. Saluran untuk komunikasi lisan adalah tatap muka, radio dan telepon. Sedangkan untuk komunikasi tertulis adalah meliputi setiap materi yang tertulis maupun sebuah media yang mampu memproduksi kata-kata tertulis seperti televisi, kaset video, LCD, OHP. Sumber berusaha untuk membebaskan saluran komunikasi dari gangguan ataupun hambatan, sehingga pesan dapat sampai kepada penerima seperti yang dikehendaki.
- d. Mengalihkan perhatian kepada penerima pesan. Jika pesan itu bersifat lisan maka penerima perlu menjadi pendengar yang baik, karena jika penerima tidak mendengar pesan tersebut akan hilang. Dalam proses ini, penerima melakukan *decoding*, yaitu memeberikan penafsiran interpretasi terhadap pesan yang disampaikan kepadanya. Pemahaman (*understanding*) merupakan kunci untuk melakukan *decoding* dan hanya terjadi

dalam pikiran penerima. Akhirnya penerimalah yang akan menentukan bagaimana memahami suatu pesan dan bagaimana pula memberikan respon terhadap pesan tersebut.

- e. Tahap akhir dalam proses komunikasi adalah *feedback* atau umpan balik yang memungkinkan sumber mempertimbangkan kembali pesan yang telah disampaikannya kepada penerima. Respon atau umpan balik dari penerima terhadap pesan yang disampaikan sumber dapat berwujud kata-kata ataupun menyimpannya. Umpan balik inilah yang dapat dijadikan landasan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi.

Unsur-Unsur Komunikasi Politik

Unsur-unsur yang ada dalam komunikasi politik tidaklah berbeda dengan unsur-unsur komunikasi pada umumnya. Dimana secara pokok terdiri dari komunikator (penyampai pesan), message (pesan), komunikan (penerima pesan). Dan Nimmo dalam mengkaji komunikasi politik melibatkan unsur-unsur komunikator politik, pesan politik, media politik, khalayak politik, serta akibat akibat politik. Komunikasi politik merupakan pembicaraan politik yang melibatkan unsur-unsur komunikasi dengan akibat-akibat politik tertentu.²²

²² Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Komunikator Pesan Media*, hlm. 8-9.

a. Komunikator

Komunikator dalam proses komunikasi politik memainkan peran sebagai pembentuk opini publik. Sedangkan pesan adalah pembicaraan-pembicaraan sebagai proses negosiasi yang bertujuan membentuk pengertian bersama diantara berbagai pihak tentang bagaimana sikap seharusnya yang harus diperankan setiap pihak dan bagaimana bertindak terhadap sesamanya. Dari sini, isi komunikasi politik seharusnya tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan tetapi juga kemungkinan terjadinya konflik. Sedangkan media politik dalam proses komunikasi politik dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang tidak hanya berhubungan dengan kepentingan juga mampu dimanfaatkan untuk berbicara kepada publik dengan sasaran tertentu. Menurut Novel Ali hal mendasar menjadi pembahasan dalam komunikasi politik adalah akibat yang ditimbulkan oleh komunikasi politik. Akibat tersebut dapat berbentuk simpati, partisipasi tetapi juga dapat berwujud sinisme, antipasti serta perlawanan politik. Dengan demikian komunikasi politik harus mampu menghasilkan pemebentukan dan perubahan sikap positif tetapi dapat juga bermakna negatif bagi komunikator politiknya.²³

Sebagai *opinion leader*, komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses opini publik.

²³ Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Politik Potret Indonesia*, hlm. 133-135.

Sosiolog Halloran, menempatkan komunikator politik dalam posisi utama dalam kegiatan komunikasi. Menurutnya proses komunikasi ditentukan oleh situasi sosial tempat dimana komunikasi bermula, berkembang dan berlangsung terus. Situasi ini mengharuskan keharmonisan hubungan antara komunikator dan komunikan dan menjadikan hubungan diantara keduanya sebagai bagian integral dari sistem sosial yang ada.

Selanjutnya Dan Nimmo,²⁴ mengidentifikasi terhadap tiga kelompok yang dapat berperan sebagai komunikator politik. Ketiga kelompok itu adalah politikus, professional dan aktivis. Sebagai komunikator politik, politikus dapat berperan sebagai wakil dari suatu kelompok, dengan sendirinya pesan-pesan politikus diarahkan untuk mencapai tujuan politik dari suatu kelompok. Di samping itu politikus juga dapat berperan sebagai ideologi dalam kegiatan komunikasi politik. Sebagai komunikator politik yang berkecenderungan sebagai ideolog, politikus mengusahakan tercapainya kebijakan yang berdampak luas, mengusahakan reformasi dan bahkan mendukung perubahan revolusioner.

Komunikator profesional dapat berfungsi sebagai manipulator dan makelar simbol yang menghubungkan pemimpin satu sama lain dengan para pengikut. Sebagai makelar simbol, profesional bertugas untuk menerjemahkan sikap, pengetahuan,

²⁴ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Komunikator Pesan dan Media*, hlm. 30-37.

dan minat suatu komunitas bahasa yang lain yang berbeda tetapi dapat dimengerti. Komunikator politik dari unsur professional terdiri atas jurnalis dan promotor. Yang termasuk dalam makelar-makelar simbol.

Terdapat dua komunikator politik dari kalangan aktivis. Yang pertama adalah juru bicara bagi kepentingan yang terorganisasi. Komunikator dari kalangan ini tidak menjadikan komunikasi politik sebagai lapangan kerja. Tetapi komunikator cukup baik dalam komunikasi dan politik, dengan demikian dapat dikatakan sebagai semi profesional. Komunikator ini berbicara untuk kepentingan terorganisasi, juga mewakili tuntutan keanggotaan suatu organisasi serta melakukan tawar menawar politik. Sedangkan yang kedua adalah pemuka pendapat. Komunikator ini mempunyai peran untuk mempengaruhi keputusan orang lain dengan meyakinkan komunikan politik untuk mengikuti pilihannya atau sering dikatakan memberikan petunjuk kepada komunikan untuk membuat keputusan yang sama dengannya. Di samping itu pemuka pendapat juga berperan meneruskan informasi politik dari media berita kepada masyarakat umum.

Dalam pemilihan komunikator politik Hoflan dan Wiss menjelaskan bahwa kredibilitas terdiri atas dua komponen yaitu keahlian dan dapat dipercaya.

b. Pesan

Teknik berkomunikasi adalah cara atau “seni” penyampaian suatu pesan yang dilakukan oleh komunikator sedemikian rupa sehingga menimbulkan dampak tertentu bagi komunikan. Pesan yang disampaikan komunikator adalah pernyataan sebagai panduan pemikiran dan perasaan, dapat berupa ide, informasi, keluhan, keyakinan, himbuan anjuran dan sebagainya.²⁵ Sedangkan pesan dalam komunikasi politik dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain.

Pesan dalam kegiatan komunikasi politik diklasifikasikan Nimmo menjadi tiga hal.²⁶ Pertama adalah pembicaraan tentang kekuasaan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain dengan janji dan ancaman. Pembicaraan kekuasaan adalah suatu usaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan jalan menyampaikan pesan-pesan politik yang berisi janji-janji atau ancaman dalam suatu kegiatan komunikasi politik. Kedua, pembicaraan pengaruh. Pesan dalam komunikasi politik dimaksudkan untuk memengaruhi khalayak dengan berbagai cara antara lain: nasehat, dorongan, permintaan, dan peringatan. Tujuan dari pembicaraan pengaruh adalah berusaha memanipulasi persepsi atau pengharapan orang lain terhadap kemungkinan mendapat untung atau rugi. Dan ketiga, pembicaraan autoritas. Pesan dari

²⁵ Onong Uchyana Effendi, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 6.

²⁶ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Komunikator Pesan Media*. Hlm. 75.

pembicaraan autoritas adalah memeberi perintah. Pembicaraan ini mengharuskan munculnya rasa kepatuhan khalayak kepada para pemimpinnya. Dengan demikian sumber-sumber autoritas sangat berbeda-beda apabila khalayak mempunyai kapabilitas yang tinggi maka pesan akan lebih mudah diterima apabila disampaikan oleh komunikator yang mempunyai latar belakang sosial yang sejenis.

c. Media

Komunikator mempunyai bentuk-bentuk simbolik dan kombinasinya dengan berbagai teknik dan media: secara lisan melalui perbincangan profesional, melalui catatan seperti Koran dan majalah, dan teknik elektronik seperti radio atau televisi. Dilihat secara luas, saluran komunikasi terdiri atas lambang-lambang, kombinasinya, dan berbagai teknik secara media yang digunakan untuk berbicara dengan khalayak. Dengan demikian maka saluran komunikasi adalah saran yang memudahkan penyampaian pesan.²⁷ Maka saluran komunikasi lebih dari sekedar titik sambungan, tetapi terdiri atas pengertian bersama tentang siapa berbicara kepada siapa, dalam keadaan bagaimana serta sejauh mana dapat dipercaya.

Dan Nimmo mengajukan tiga jenis media komunikasi yang digunakan dalam kegiatan komunikasi politik. Ketiga jenis media tersebut adalah: media massa, media komunikasi interpersonal dan

²⁷ *Ibid*, hlm. 166.

media komunikasi organisasi.²⁸ Ada dua bentuk saluran komunikasi massa, masing-masing berdasarkan tingkat langsungnya komunikasi satu kepada banyak. Bentuk yang pertama terdiri atas komunikasi tatap muka seperti bila seorang kandidat politik berbicara di depan rapat umum atau ketika seseorang berbicara di depan khalayak besar atau konferensi pers. Bentuk yang kedua terjadi jika ada perantara ditempatkan di antara komunikator dan khalayak. Di sini media, teknologi, sarana komunikasi lainnya turut serta. Batas media massa dari penjelasan bersifat longgar tidak hanya berhenti pada media elektronik dan cetak, tetapi juga media-media komunikasi yang berbentuk rapat-rapat besar dan pertemuan-pertemuan.

Sedangkan media komunikasi interpersonal merupakan bentuk hubungan satu kepada satu. Media (saluran) ini dapat berbentuk tatap muka maupun perantara. Sedangkan media komunikasi ketiga adalah komunikasi organisasi yang menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak. Akan tetapi komunikasi politik satu kepada satu yang melibatkan organisasi jarang dilakukan. Oleh sebab itu saluran komunikasi satu kepada banyak dengan melalui perantara dijadikan alternatif sebagai media komunikasi organisasi. Bentuk dari komunikasi perantara ini adalah penyebaran pamphlet dan tidak

²⁸ *Ibid*, hlm.168.

jarang yang sering terjadi di Indonesia adalah penyampaian pesan komunikasi politik melalui pembagian atribut seperti kaos-kaos maupun sembako kepada khalayak.

d. Khalayak

Jalaluddin Rakhmat menjelaskan pengertian khalayak dengan sejumlah orang yang heterogen. Mereka menjadi khalayak komunikasi politik segera setelah mereka “mengkristal” menjadi opini publik.²⁹ Arthur F. Bentley dalam bukunya *The Process of Government* sebagaimana dikutip Dan Nimmo memberikan pengertian yang mengarah pada pemahaman tentang khalayak sebagai bagian tertentu dari orang-orang dalam masyarakat yang diperlakukan tidak sebagai massa fisik yang terpisah dari masa yang lain, tetapi sebagai “kegiatan massa yang tidak menghalangi orang yang berpartisipasi di dalamnya untuk berpartisipasi juga dalam banyak kegiatan kelompok yang lain”.³⁰ Sedangkan Nimmo memberikan pengertian khalayak dengan sejumlah orang yang bertindak atau cenderung bertindak yaitu, dalam berbagai tahap tindakan. Bila didefinisikan sebagai suatu kegiatan, suatu kelompok terdiri atas orang-orang yang melakukan kegiatan yang dipersatukan tanpa menghiraukan apakah yang mendasari kegiatan itu berupa organisasi formal atau tidak formal. Artinya orang

²⁹ Jalaluddin Rakhmat, *Komunikasi Politik Hubungan Antara Khalayak dan Efek, Sebuah Pengantar Dalam Dan Nimmo, Komunikasi Khalayak dan Efek*, terj. Jalaluddin Rakhmat, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. vi.

³⁰ *Ibid*, hlm. 47.

bergabung untuk bertindak dalam proses opini meskipun tidak diorganisasi secara formal membentuk kelompok atau opini publik.³¹

Khalayak dibagi atas khalayak yang terorganisir, tidak terorganisir dan khalayak umum (khalayak banyak) serta publik kepemimpinan. Khalayak terorganisasi terbagi dalam tiga kelompok, publik atentif, publik berpikiran isu dan publik ideologis.³² Publik atentif merupakan kumpulan warga Negara yang dibedakan berdasarkan tingkatnya dalam keterlibatan politik, informasi, perhatian dan berpikiran kewarganegaraan. Publik atentif sering bermain sebagai pemuka pendapat, yakni orang-orang yang sering dimintai pendapatnya oleh warga Negara lain yang kurang informasi dan kurang keterlibatannya dalam politik. Publik atentif menempati posisi penting dalam proses opini karena mereka bertindak sebagai saluran komunikasi interpersonal dalam aliran pesan timbal balik antara pemimpin politik dan publik umum. Publik atentif juga bergabung dengan pemimpin politik sebagai pembawa konsensus dan sebagai perantara antara khalayak umum dengan pimpinan politik.

Publik berpikiran isu adalah sekumpulan khalayak yang memusatkan perhatian pada suatu isu tertentu. Sekumpulan khalayak yang memusatkan perhatian pada isu yang sama

³¹ *Ibid*, hlm. 47-48.

³² *Ibid*, hlm. 48-54.

kemudian membentuk publik khusus, publik yang pada akhirnya bisa – tetapi tidak perlu – mengatur diri menjadi kelompok formal. Sedangkan khalayak (publik) ideologis adalah orang yang memiliki kepercayaan yang relatif tertutup, yang nilai-nilainya adalah suka dan tidak suka dipegang erat-erat. Sistem kepercayaan yang terdapat dalam publik ideologis konsisten secara internal. Mereka menganut kepercayaan dan atau nilai yang secara logis melekat, tidak berkontradiksi satu sama lain.

e. Efek

Efek adalah dampak sebagai pengaruh dari pesan.³³ Dalam komunikasi pemilihan umum dan pilkada, efek yang diharapkan dari kegiatan komunikasi politik adalah pemberian suara kepada partai atau calon yang diusungnya.

c. Pola Komunikasi Politik

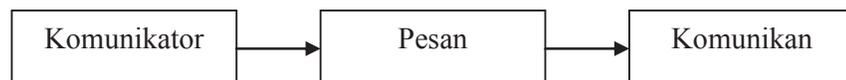
Komunikasi politik bukanlah suatu bentuk komunikasi yang spesifik dan terpisah dari model komunikasi sosial. Komunikasi politik hanyalah sebagian dari komunikasi sosial, karena itu pola-pola dasarnya pun mengikuti pola-pola komunikasi sosial. Yang dimaksud adalah komunikasi vertikal (dari atas ke bawah dan sebaliknya, misalnya pemimpin masyarakat kepada masyarakat yang dipimpinnya atau sebaliknya), pola komunikasi

³³ Onong Uchyana Effendi, *Dinamika Komunikasi*, hlm. 6.

horizontal (komunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain), pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal) dan pola organisasi informal (komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka langsung, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur formal yang berlaku dalam satu organisasi).³⁴ Berikut ini adalah pola-pola komunikasi politik:

a. Pola Komunikasi Primer (*One Way Communication*)

Dalam pola ini terbagi menjadi lambang verbal dan nonverbal. Pola komunikasi ini dinilai sebagai model klasik, karena model pemula yang dikembangkan oleh Aristoteles.³⁵



Bagan 1.2

Pola Komunikasi Klasik Aristoteles

Sumber: Aristoteles

Komunikasi yang ditelaah oleh Aristoteles ini merupakan bentuk komunikasi retorik, yang kini lebih dikenal dengan nama komunikasi publik (*Public Speaking*) atau pidato. Tipe komunikasi yang menggunakan pola ini adalah komunikasi

³⁴ Rafael Raga Maram, *Pengantar Sosiologi Politik Suatu Pemikiran dan Penerapan*, cet. Pertama, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm.163.

³⁵ Hafidz Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 7.

personal yang meliputi komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Pola komunikasi ini kemudian dikenal dengan nama komunikasi primer, yaitu komunikasi dengan menggunakan lambang atau bahasa sebagai sarana utamanya.

b. Pola Komunikasi Sekunder

Pola komunikasi sekunder diartikan sebagai proses penyampaian pesan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media utama. Komunikasi ini lazim digunakan apabila khalayak yang menjadi sasaran komunikasi jauh jaraknya dan mempunyai jumlah yang banyak. Pola komunikasi sekunder ini diilhami oleh pola komunikasi sederhana yang dibuat Aristoteles yang kemudian mempengaruhi Harold D. Laswell untuk membuat pola komunikasi yang disebut formula Laswell pada tahun 1948. Model komunikasi Laswell secara spesifik banyak digunakan dalam kegiatan komunikasi massa. Dalam penjelasannya Laswell menyatakan bahwa untuk memahami proses komunikasi perlu dipelajari setiap tahapan komunikasi.

Pola komunikasi Laswellian melibatkan lima komponen komunikasi sebagai berikut:

- Who
- Say what
- In wich channel

- To whom
- With what effect³⁶

Dengan demikian pola komunikasi Laswell melibatkan lima unsur komunikasi yang saling terkait yaitu: komunikator, pesan, media, komunikan dan efek. Kelima dasar Laswell ini menyajikan cara yang berguna untuk menganalisis komunikasi.

Pendapat Laswell di atas juga mengilhami Philip Kotler dalam menjelaskan pola komunikasi.

Pola komunikasi politik yang digunakan oleh Philip Kotler ini melibatkan:

- Sender: Komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang.
- Encoding: Penyandian, yakni proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang.
- Message: Pesan yang merupakan seperangkat lambing bermakna yang disampaikan oleh komunikator.
- Media: Saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator kepada komunikan.
- Decoding: Proses dimana komunikan menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya.

³⁶ John Fiske, *Cultural And Communication Studies Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*, ter. Yosali Iriantara, Idy Subandi Ibrahim, (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), hlm. 46.

- Receiver: Komunikan yang menerima pesan dari komunikator.
- Response: Tanggapan, seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterima pesan.
- Feedback: Umpan balik, yakni tanggapan komunikan apabila tersampaikan pesan atau disampaikan kepada komunikator.
- Noise: Gangguan tidak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi.

c. Pola Komunikasi Linear

Pada tahun 1949 berkembang pola komunikasi linear yang digagas oleh Shannon dan Weaver. Linear mengandung arti lurus yakni perjalanan dari satu titik ke titik yang lain secara lurus. Penyampaian pesan kepada komunikan oleh komunikator sebagai titik terminal. Jadi dalam proses komunikasi ini biasanya terjadi dalam tatap muka, tetapi juga dapat digunakan dalam komunikasi bermedia. Dalam komunikasi ini pesan yang disampaikan akan efektif apabila ada perencanaan sebelum melakukan komunikasi. Pola komunikasi Shannon dan Weaver berakar dari teori matematik dalam permesinan (*Engginering Communication*) Shannon. Shannon dan Weaver mengidentifikasi tiga level masalah dalam studi komunikasi. Hal itu adalah:

LEVEL A Bagaimana simbol-simbol komunikasi dapat (masalah teknis) ditransmisikan secara akurat?

LEVEL B Bagaimana symbol-simbol yang ditarnsmisikan (masalah semantik) secara persisi menyampaikan makna yang diharapkan?

LEVEL C Bagaimana makna yang diterima secara efektif (masalah keefektifan) mempengaruhi tingkah laku dengan cara yang diharapkan?³⁷

d. Pola Komunikasi Sirkular (*Multiple Step Flow Communication*)

Pola komunikasi politik yang dikembangkan oleh Laswell kemudian banyak dijadikan landasan oleh para ahli dalam mengembangkan pola komunikasi politik, salah satunya adalah Dan Nimmo. Nimmo menjelaskan tentang fenomena komunikasi politik yang berlangsung di Amerika Serikat, agar komunikasi berjalan secara sirkular. Nimmo membuat perubahan kecil dalam menjelaskan rangkaian komunikasi yang melibatkan lima unsure tersebut dengan siapa mengatakan apa dengan saluran apa dengan (bukan kepada) siapa dengan akibat apa.³⁸

Circular secara harfiah berarti bulat, bundar atau keliling.

Dalam proses sirkular itu terjadinya *feedback* atau umpan balik,

³⁷ John Fiske, *Cultural And Communication Studies Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*, 14

³⁸ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Komunikator Pesan dan Media*, hlm. 14.

yaitu terjadinya arus dari komunikan ke komunikator sebagai penentu keberhasilan komunikasi. Dalam pola komunikasi yang seperti ini proses komunikasi berjalan terus yaitu adanya umpan balik antara komunikator dan komunikan.

Pola komunikasi sirkular ini didasarkan pada perspektif interaksi yang menekankan bahwa komunikator atau sumber respon secara timbal balik pada komunikator lainnya. Perspektif interaksional ini menekankan tindakan yang bersifat simbolis dalam suatu perkembangan yang bersifat proses dari suatu komunikasi manusia.

Dalam pola komunikasi sirkular mekanisme umpan balik dalam komunikasi dilakukan antara komunikator dan komunikan saling mempengaruhi (interplay) antara keduanya yaitu sumber dan penerima. Osgood bersama Schram pada tahun 1954 menentukan peranan komunikator dan penerima sebagai pelaku utama komunikasi.

Tipe komunikasi yang menggunakan pola ini adalah komunikasi interpersonal yang tidak membedakan antara komunikator dan komunikan.

2. Legislatif dan Proses Pencalonan Legislatif

Setiap warga Negara dalam suatu Negara dalam berbicara, bersikap dan berperilaku tidak bisa terlepas dari aturan, ketentuan

suatu Negara. Aturan dan ketentuan tersebut semuanya tertuang dalam UUD, UU, PERPU dan PERDA bagi pelaksanaan semua bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Badan yang bertugas menyusun aturan dan ketentuan yang tersebut di atas adalah Badan legislatif (Badan pembuat undang-undang).

Badan legislatif (parlemen) yaitu lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang yang anggota-anggotanya merupakan representasi dari rakyat Indonesia dimanapun dia berada (termasuk yang berdomisili di luar negeri) yang dipilih melalui pemilihan umum.³⁹

Pada awalnya badan legislatif hanya sekelompok orang yang diberi tugas oleh raja untuk mengumpulkan dana bagi membiayai kegiatan pemerintahan serta peperangan. Akan tetapi lambat laun dalam setiap penyerahan dana (semacam pajak) disertai tuntutan agar pihak raja menyerahkan pula beberapa hak *privilege* sebagai imbalan. Dengan demikian secara berangsur-angsur sekelompok orang tersebut berubah namanya menjadi badan legislatif (Parlemen) yang bertindak sebagai badan yang membatasi kekuasaan raja yang *absolute*. Dalam perkembangannya badan legislatif ini dilakukan pemilihan melalui mekanisme pemilihan umum sehingga dapat diterima keberadaannya secara sah dan menyeluruh di seluruh dunia sebagai badan yang

³⁹ A. rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 123.

mewakili rakyat dan memiliki wewenang untuk menentukan kebijaksanaan umum dalam membuat undang-undang.

Dewan perwakilan rakyat di Negara demokratis disusun sedemikian rupa sehingga ia mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepadanya. Untuk meminjam perumusan C.F Strong: “Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu”.⁴⁰ Atau dengan perkataan lain, Negara demokratis yang menjamin kedaulatan rakyat.

Proses pencalonan legislatif melalui pemilihan umum. Pemilihan umum disebut juga dengan “*Political Market*” (Dr. Indria Samego).⁴¹ Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (Radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti, spanduk, pamphlet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau lobby yang berisi

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 124.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 147.

penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif.

Tujuan Pemilihan Umum menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD adalah: “Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945”.⁴²

a. Peran, Tugas Pokok dan Fungsi Legislatif

Badan-badan legislatif Indonesia memiliki fungsi dan wilayah kewenangan yang berbeda-beda. Sebab itu, Jimly Asshiddiqie menyebut Indonesia setelah Amandemen ke-4 UUD 1945 menerapkan sistem Trikameral (sistem tiga kamar) dalam lembaga perwakilan rakyat karena terdiri atas tiga lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).⁴³

⁴² *Ibid*, hlm. 148.

⁴³ Seta Basri, “Badan *Legislatif di Indonesia* atau Representatives Bodies” dalam <http://setabasri01.blogspot.com/2009/02/legislatif-di-indonesia.html>

Peran Badan Legislatif :

1. Melakukan pembahasan, diskusi, dan pemilihan kebijakan-kebijakan
2. Sarana untuk membuat sikap-sikap populer dan nilai yang berdampak kepada pemerintahan dan politik secara umum atau dikenal dengan sosialisasi politik
3. Rekrutmen pemimpin-pemimpin politik
4. Memformulasikan dan menegakkan legislasi
5. Mewakili berbagai kepentingan masyarakat
6. Ajudikasi
7. Kontrol terhadap eksekutif

Lembaga Legislatif bikameral merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tugas dan wewenang :

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum
3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya
4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden
5. Memilih Wakil Presiden
6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden⁴⁴

⁴⁴ Sseituko, “*Peranan Legislatif dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan*” dalam <http://sseituko.wordpress.com/2010/04/29/peranan-legislatif-dalam-melaksanakan-fungsi-pengawasan/>

Di antara fungsi badan legislatif yang paling penting ialah:

1. Menentukan *policy* (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang. Untuk itu dewan perwakilan rakyat diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak *budget*.
2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan yang telah ditetapkan menurut undang-undang

Dalam rangka melaksanakan fungsi kontrolnya, Badan legislatif berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif, supaya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkannya. Pengawasan dilakukan melalui kontrol yang khusus, dengan menggunakan hak-haknya yang meliputi:

1. Hak Bertanya

Anggota Badan Legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai sesuatu hal.

Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak bertanya. Pertanyaan ini biasanya diajukan secara tertulis dan dijawab pula secara tertulis oleh departemen yang bersangkutan.

2. Hak Interpelasi

Hal ini adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaannya di suatu

bidang. Misalnya, bidang politik, ekonomi, social budaya dan hankam.

Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali Dewan perwakilan Rakyat Gotong-Royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak interpelasi.

3. Hak Angket (Enquete)

Hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai soal ini, dengan harapan agar diperhatikan oleh pemerintah.

Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong dalam masa Demokrasi Terpimpin, mempunyai hak angket.

4. Mosi Tidak Percaya

Umumnya dianggap bahwa hak mosi merupakan control yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima sesuatu mosi tidak percaya, maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri dan terjadi suatu krisis kabinet.

Di Indonesia pada sistem parlementer, badan legislatif mempunyai hak mosi, tetapi mulai tahun 1959 hak ini ditiadakan.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu fungsi utama badan legislatif adalah pengawasan terhadap eksekutif. Peran pengawasan ini pada kenyataannya mengalami pasang surut atas kualitas dan kekuatannya. Pada periode sebelum reformasi, peran kontrol legislatif terhadap eksekutif dapat dikatakan mandul, sehingga eksekutif dapat melakukan apapun sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

b. Perempuan Dalam Kancah Legislatif

Jaringan kerja sama sangat diperlukan oleh kaum perempuan dalam perjuangan menjadi politisi dan anggota parlemen. Kerja sama dengan berbagai pihak dipandang akan lebih memudahkan kaum perempuan aktif di politik. Penerapan otonomi daerah yang sudah melewati satu dekade belum membawa hasil yang positif bagi pengembangan daerah termasuk di dalamnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) perempuan sebagai salah satu stakeholders dalam pembangunan daerah.

Justru pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak terhadap perempuan. Keterlibatan perempuan dalam pengambilan

keputusan dapat dicapai dengan salahsatunya adalah masuknya perempuan ke institusi politik, yakni partai politik yang kemudian dapat mengantarkan perempuan masuk ke institusi legislatif (Parlemen). Keterlibatan perempuan dalam badan legislatif tersebut, akan memberikan warna dan *bargaining positions* bagi posisi perempuan dalam masyarakat dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut pemberdayaan perempuan. Perempuan yang menurut konsep Antonio Gramsci adalah masyarakat sipil yang tidak mungkin melakukan perjuangan hanya oleh salah satu kelompok perempuan saja, akan tetapi, perjuangan mendobrak hegemoni laki-laki di politik yang sangat baik jika dilakukan secara bersama-sama. Pendobrakan terhadap kekuatan dominan laki-laki dalam wilayah politik merupakan perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama, yang kemudian mampu menciptakan kekuatan masyarakat sipil yang menggerakkan perjuangan

Dalam konteks Gramsci keberhasilan kaum perempuan memperjuangkan kebijakan kuota 30 persen dapat dianggap sebagai proses tercapainya keseimbangan posisi tawar antara gerakan perempuan, yang direpresentasikan sebagai masyarakat sipil dengan negara, yang disebutnya sebagai masyarakat politik, dalam pertarungan ide antara keduanya. Negara sebagai masyarakat politik selama ini dipercaya telah melakukan hegemoni

politik atas masyarakat sipil, yang dalam konteks ini adalah kaum perempuan. Hegemoni negara telah dikalahkan oleh masyarakat sipil dan pertarungan ide dimenangkan oleh kaum perempuan sehingga memunculkan nilai-nilai baru yang lebih berpihak kepada kaum perempuan. Pada fase ini Gramsci menyebutnya sebagai gerakan counter hegemoni dimana kaum perempuan mampu tampil dan melahirkan hegemoni baru setelah memenangkan pertarungan ide melawan hegemoni lama

Dalam upaya melakukan "*counter hegemoni*" kaum perempuan, sebagaimana di sebutkan diatas, harus memiliki posisi tawar (bargaining position) yang tinggi. Posisi tawar yang tinggi sangat dipengaruhi oleh banyak instrumen pendukung yang salah satunya adalah Media. Kebutuhan akan dukungan media industri menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan Media Industri memiliki gaung yang lebih luas dan cenderung lebih dapat diterima oleh publik dibanding media komunitas. Disamping itu Media industri juga mampu menempatkannya sebagai instrumen yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh hubungan saling ketergantungan yang kuat antara media industri dengan masyarakat itu sendiri.

Dalam aktivitas politik perempuan, dukungan partai politik terhadap proses pemenuhan kuota 30 persen atas dasar UU Pemilu 2009

Berbicara mengenai keterwakilan perempuan di politik dan legislatif berkaitan dengan affirmative action, kuota 30 persen, maka hal tersebut sangat tergantung kepada kebijakan partai politik. Dukungan partai politik sebagaimana diamanatkan oleh UU Partai politik dalam penentuan calon legislatif. Dengan kata lain hanya melalui partai politiklah, calon legislatif dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilu. Partai politik adalah pintu masuk bagi para politisi untuk menjadi anggota legislatif. Partai politik adalah wadah dimana para politisi, baik laki-laki maupun perempuan untuk berkiprah dalam politik praktis. Partai politik memiliki peranan yang sangat kuat berkaitan dengan pemilu dan calon legislatif. Hal ini juga menjelaskan bahwa para kandidat harus mengenal dan menjadi bagian dari partai politik sebagai instrument dan sekaligus sistem perpolitikan di Indonesia. Besarnya kekuasaan partai politik dalam menentukan calon legislatif, bagi kalangan perempuan menjadi kendala tersendiri. Perempuan yang realitanya sangat sedikit menjadi pengurus partai dan aktif dalam aktivitas partai secara kontinyu, memungkinkan kesempatannya kecil bagi kaum perempuan jika penentuan calon legislatif hanya dilakukan oleh partai politik. Sebagaimana diamanatkan oleh UU Partai politik, pada dasarnya memang penentuan calon legislatif sepenuhnya hal partai politik, akan tetapi dengan adanya ketentuan kuota 30 persen yang

mensyaratkan partai politik mencalonkan 30 persen perempuan sebagai calon legislatif, terbuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi aktif di politik dan menjadi calon anggota legislatif.

3. Komunikasi Politik Perempuan Dalam Proses Calon Legislatif

Salah satu upaya untuk peningkatan keterwakilan perempuan adalah adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan terhadap proses politik yang memastikan peningkatan keterwakilan perempuan pada tingkat yang diharapkan. Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu adalah salah satu indikator yang sangat penting untuk menjamin peningkatan keterwakilan perempuan yang duduk di DPR. Undang-Undang (UU) Partai Politik dan Pemilu menjadi ukuran untuk melihat bagaimana respon negara terhadap indikator kesetaraan gender. Undang-Undang Pemilu dapat memberikan jaminan bagi perempuan untuk dapat mengikuti proses pencalonan sampai terpilihnya dalam pemilu.

Di Indonesia, sejak diberlakukannya pasal 65 Undang-Undang Pemilu No.12 Tahun 2003 tentang kuota perempuan 30% pada pemilu 2004 secara terus-menerus dibutuhkan penguatan terhadap UU tersebut dan evaluasi di setiap Pemilihan Umum (pemilu). UU Pemilu ini telah diubah menjadi UU No.8 Tahun 2008, dengan mencantumkan nomor urut 1 sampai 3 harus ada calon perempuan. Sementara UU No.31

Tahun 2002 tentang Partai Politik belum mencantumkan masalah kuota secara tegas telah diperbaiki dengan UU No.2 Tahun 2008.

Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut maka dalam pemilu 2004 dan 2009 terlihat peningkatan yang signifikan pada jumlah calon legislatif (caleg) perempuan, namun belum secara otomatis memberikan kesempatan kepada perempuan untuk terpilih dalam pemilu. Peningkatan jumlah keterwakilan perempuan menjadi sangat penting baik dalam kerangka peningkatan *the politics of presence* maupun dalam kerangka *the politic of ideas* (kebijakan kesejahteraan Ibu dan Anak serta keluarga) dari kepentingan perempuan sebagai mayoritas penduduk suatu negara.

Dalam menjalankan hak politik warga untuk peningkatan jumlah dan suara perempuan dalam pemilu 2014 yang akan datang, WRI ingin mendiskusikan hasil kajian mengenai RUU Pemilu. Kajian ini sebagai usulan sekaligus melakukan *up-dating* mengenai RUU Pemilu dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemilu 2014 dengan para pengambil keputusan di parlemen, seperti ketua Fraksi, pimpinan dan anggota Panja RUU Pemilu, perempuan anggota parlemen serta Sekjen dan departemen pemberdayaan perempuan partai politik.⁴⁵

⁴⁵ Women Research Institute, "Peningkatan Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2014" dalam http://wri.or.id/id/pengembangan/kapasitas/Diskusi/Kamisan?q=id/pengembangan/kapasitas/kamisan/Peningkatan_KeterwakilanPerempuan/Pada_Pemilu_2014

Dalam upaya untuk memperteguh pilihan politik, sebagian besar perempuan berupaya mendapatkan informasi politik melalui saluran komunikasi interpersonal, media massa, dan organisasi politik. Pada saluran komunikasi interpersonal dan organisasi politik, sebagian besar perempuan ingin mendapatkan informasi tentang kemampuan calon legislatif dan presiden dalam memimpin. Pada saluran media massa, perempuan cenderung memilih informasi tentang tata cara pemilihan legislatif dan presiden.

Dalam proses komunikasi interpersonal untuk mendapatkan informasi politik, sebagian besar perempuan cenderung mengalami intervensi pilihan politik. Suami merupakan pasangan komunikasi interpersonal perempuan yang sering melakukan intervensi pilihan politik.

Pada proses komunikasi interpersonal, sebagian besar perempuan cenderung tidak mampu menjaga independensi pilihan politiknya setelah mendapat intervensi. Perempuan cenderung memilih pilihan politik yang disarankan oleh suami atau orang tua.⁴⁶

a. Proses Komunikasi Politik Pada Legislatif

Seperti halnya kegiatan komunikasi pada umumnya, komunikator politik dapat disebut sebagai pihak yang memprakarsai penyampaian pesan pihak lain dalam aktivitas

⁴⁶ UPN Jatim, "Pola Komunikasi Politik Perempuan dalam Pemilu" dalam <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/ilkom/article/view/358>

politik. Dalam komunikasi politik, komunikator dapat dibedakan berdasarkan individu-individu, lembaga, atau sekumpulan beberapa atau orang banyak (kolektif).

Jika seorang tokoh atau pejabat ataupun rakyat biasa bertindak sebagai sumber di dalam sebuah kegiatan komunikasi politik, maka dalam beberapa hal ia bisa dikatakan sebagai sumber individual (*individual source*). Pada konteks lain, meskipun seseorang individu yang berbicara, tapi bila ia menjurubicarai sebuah lembaga ataupun organisasi, maka pada saat itu bisa dianggap sebagai *collective source* atau sumber kolektif.

Pembedaan antara komunikator individual dan yang kolektif dalam proses komunikasi politik dapat digambarkan sebagai berikut:

Sumber individual saling berkaitan dengan sumber kolektif. Para pejabat birokrat sebagai sumber individual tentunya berada di bawah suatu pelaksanaan dan pengawasan pemerintah atau birokrasi. Pada tingkat pemerintah tersebut kebijakan direncanakan dan diputuskan untuk dilaksanakan.

Tentang mereka yang berkedudukan sebagai birokrat, Katz dan Kahn (1966) mengemukakan “Seorang birokrat adalah anggota suatu birokrasi yang merupakan suatu organisasi dengan tugas melaksanakan suatu kebijakan (policy) yang ditentukan oleh pembuat kebijaksanaan (policy makers)”.

Seorang birokrat hanya dapat bekerja dalam bidang yang sudah ada aturannya. Apabila ada sesuatu hal yang belum ada peraturannya sebagai dasar pelaksanaannya maka seorang birokrat tidak merasa dirinya kompeten untuk melaksanakannya.⁴⁷

b. Proses Komunikasi Politik Perempuan Dalam Legislatif

Perubahan sistem politik dengan lahirnya Undang-Undang Pemilu baru dengan memberikan porsi perempuan pada bidang legislatif diharapkan dapat menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dalam proses komunikasi politik khususnya dalam hal pengambilan keputusan publik. Diskriminasi perempuan dalam bidang komunikasi politik selama ini merupakan implikasi dari proses komunikasi politik yang tidak *fair* dimana laki-laki lebih banyak mendominasi dalam proses komunikasi politik. Dampak lebih jauh dari dominasi ini adalah kebijakan-kebijakan yang dihasilkan menguntungkan laki-laki daripada perempuan. Sebagai contoh hukum adalah salah satu alat yang sebenarnya amat diandalkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hukum sangat diharapkan dapat memberikan keadilan bagi perempuan korban. Namun fakta menunjukkan lain, hukum di Indonesia justru seringkali melakukan kekerasan terhadap perempuan. Akibat hukum yang tidak berperspektif gender,

⁴⁷ Anne Ahira “Definisi Komunikasi Politik” dalam <http://www.anneahira.com/komunikasi-politik.htm>

perempuan korban kekerasan justru dapat dipersalahkan, diperlakukan secara tidak hormat, atau dikorbankan lebih jauh. (Komnas Perempuan, 2002 : 200).

Melihat proses sejarah kepemimpinan Orde Baru menunjukkan bahwa ada tindakan pengucilan kaum perempuan dalam proses komunikasi politik. Hal ini bisa dilihat selama pemerintahan Orde baru, tingkat partisipasi perempuan sangat rendah yakni kurang dari 10 % di lembaga legislatif. Kabinet hanya menyediakan dua pos untuk menteri yang diisi oleh perempuan, yaitu menteri peranan wanita yang tidak memiliki kekuasaan dan sumber daya, dan menteri sosial. Ideologi di balik adalah perempuan mempunyai sifat *caring* dan *nurturing* atau domestikasi dari perempuan perempuan untuk melegitimasi sistem yang patriarki. Faktor lainnya adalah adanya proses kooptasi organisasi perempuan oleh negara. Ketidakmampuan perempuan untuk melakukan pembontakan atas dominasi sistem patriarki disebabkan oleh depolitisasi yang dilakukan oleh negara secara sistematis (Sjaifudin, 2001 : 71). Organisasi perempuan seperti PKK dan Dharma Wanita tidak dapat diandalkan sebagai alat advokasi kepentingan perempuann cenderung lebih bahkan ada kecenderungan organisasi ini sebagai wadah untuk propaganda partai Golkar.

Menurut Lycette (1994), ada beberapa faktor yang menjadi kendala partisipasi perempuan dalam komunikasi politik yaitu :

1. Perempuan menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran reproduktif serta peran produktif, di dalam maupun diluar rumah. Peran produktif, perempuan berusaha membantu dalam hal pendapatan keluarga. Sedangkan peran reproduktif yaitu peran perempuan sebagai nyonya rumah (*home maker*) yang bertanggung jawab atas kegiatan reproduktif dan pekerjaan domestik. Adanya peran ganda tersebut, membatasi waktu pilihan-pilihan perempuan untuk berpartisipasi dalam komunikasi politik.
2. Perempuan relatif memiliki pendidikan lebih rendah daripada laki-laki. Tingkat pendidikan perempuan yang rendah dan perbedaan kesempatan yang diperoleh anak perempuan dan laki-laki, terjadi di seluruh dunia. Akibatnya, jumlah perempuan yang tidak dapat mengakses informasi tentang peluang-peluang bisnis, kesempatan kerja, dan partisipasi dalam kehidupan politik pun menjadi tinggi.
3. Adanya hambatan budaya yang terkait dengan pembagian kerja secara seksual dan pola interaksi perempuan dengan laki-laki yang membatasi gerak perempuan. Selain itu, pembatasan terhadap mobilitas perempuan yang didasarkan pada

pertimbangan keamanan, juga merupakan hambatan yang muncul.

4. Adanya hambatan legal bagi perempuan seperti larangan berpartisipasi dalam politik tanpa seijin suami.

Sedangkan menurut Shirley Ardener (pakar teori feminis komunikasi) menyatakan bahwa ketidakberdayaan perempuan dalam komunikasi politik memiliki beberapa manifestasi dan terlihat jelas dalam diskursus publik. Kaum perempuan merasa tidak nyaman dalam situasi publik dibanding laki-laki dan perempuan merasa tidak enak dalam situasi-situasi publik daripada mereka sendirian. Kaum wanita lebih hati-hati dengan apa yang mereka katakan dan menerjemahkan apa yang mereka rasakan dan pikirkan dalam pengertian-pengertian kaum pria (Littlejohn, 1999 : 406).

Sedangkan Cheri Kramane menguraikan asumsi-asumsi dasar tentang ketidakberdayaan perempuan dalam komunikasi antara lain :

1. Kaum pria dan perempuan memiliki pengalaman yang berbeda berdasarkan pemisahan tenaga kerja dalam masyarakat, mereka memandang dunia dengan cara yang berbeda.
2. Kaum pria dominan secara politis dalam masyarakat dan oleh sebab itu sistem persepsi mereka menjadi dominan

yang menyebabkan persepsi kaum wanita tidak adopsi secara luas.

3. Kaum wanita harus menerjemahkan cara-cara pemahaman mereka sendiri ke dalam pengertian kaum pria tentang dunia untuk bisa berpartisipasi dalam kehidupan publik.⁴⁸

B. Kajian Teori

1. Teori Partisipasi

A. Konsep Partisipasi politik

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yang artinya “*art*” yang berarti bagian. Jika kata “*part*” dikembangkan menjadi kata kerja maka kata ini menjadi “*to Participate*” yang bermakna turut ikut ambil bagian. Sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti Kota, negara kota. Secara umum definisi partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau orang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan untuk memilih pimpinan negara dan secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Berikut beberapa definisi partisipasi menurut beberapa ahli. Adapun pengertian partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althoft yakni:

⁴⁸ [http://www.google.com/url? http://Fejournal.upnjatim.ac.id/Findex.php/Filkom](http://www.google.com/url?http://Fejournal.upnjatim.ac.id/Findex.php/Filkom)
Farticle download.

“Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan”.⁴⁹

Segala kegiatan warga negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik. dalam hubungan dengan negara-negara baru Samuel P.Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya yang berjudul pembangunan politik di negara-negara berkembang member tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara ekspilisit tindakan illegal dan kekerasan. Menurut mereka, partisipasi politik adalah:

“Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif”⁵⁰

Kemudian Ramlan Surbakti juga memberikan pengertian yang sejalan dengan pengertian partisipasi politik diatas yakni:

⁴⁹ Michael Rush dan Philip Althoft, *Pengantar Sosiologi Politik*: (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 121.

⁵⁰ Samuel P. Huntington dan Nelson, *Op.Cit.*, hlm. 16-18.

“Partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pimpinan pemerintahan”⁵¹

Partisipasi politik tersebut didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh warga negara biasa. Lalu kemudian Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik tersebut sebagai berikut:

“Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara, secara langsung atau tidak langsung dalam mempengaruhi kebijakan negara. Kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara pada pemilihan umum, dalam menghadiri rapat umum, menjadi salah satu anggota partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya”⁵²

Dalam hal ini, Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik tersebut sebagai kegiatan individu atau kelompok yang bertujuan agar masyarakat tersebut ikut aktif dalam kehidupan politik, memilih pimpinan public atau mempengaruhi kebijakan publik.

⁵¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), hlm. 118.

⁵² Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 1.

Dalam bukunya Mas'ood dan Mac Andrews tahun 1981, dengan judul perbandingan sistem politik. Putnam membuat suatu model skematis stratifikasi sosial politik. model tersebut dibangun berdasarkan data dari beberapa negara tentang proporsi warga negara yang terlibat dalam berbagai tingkat kegiatan politik. Pada puncak piramida terletak pada kelompok pembuat keputusannya itu individu-individu yang secara langsung terlibat di dalam pembuatan kebijaksanaan nasional.⁵³

Berdasarkan beberapa definisi kelompok partisipasi politik yang dikemukakan oleh beberapa sarjana ilmu politik tersebut, secara substansial menyatakan bahwa setiap partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan sukarela yang nyata dilakukan, atau tidak menekankan pada sikap-sikap. Kegiatan partisipasi politik dilakukan oleh warga negara preman atau masyarakat biasa, sehingga seolah-olah menutup kemungkinan bagi tindakan-tindakan serupa yang dilakukan oleh warga negara asing yang tinggal di negara yang dimaksud.

Selain itu dalam partisipasi politik berarti dimungkinkan terdapat hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya. Kita ketahui bahwa yang berperan melakukan kegiatan politik itu adalah warga negara yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan, akan tetapi masyarakat mempunyai

⁵³ Damsar Prof, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 10.

hak untuk mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan tersebut.⁵⁴

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membedakan partisipasi menjadi dua yakni: partisipasi otonom (dilakukan pribadi secara sadar) dan partisipasi yang dimobilisasi (digerakkan).⁵⁵ Apabila kegiatan partisipasi itu dilakukan oleh pelakunya sendiri maka partisipasi tersebut dapat digolongkan kedalam partisipasi otonom, sedangkan jika kegiatan tersebut digerakkan oleh orang lain maka dapat dimasukkan kedalam partisipasi otonom. Sedangkan kegiatan tersebut digerakkan oleh orang lain maka dapat dimasukkan kegiatan partisipasi mobilisasi.

B. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi dengan asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi, orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa

⁵⁴ Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 5-6.

⁵⁵ Samuel P. Huntington dan Nelson, *Op Cit*, hlm. 9-12.

dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.

Keputusan politik menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Maka partisipasi berarti keikutsertaan warga negara biasa atau yang tidak mempunyai kewenangan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai suatu kegiatan dan membedakan partisipasi aktif dan partisipasi pasif.⁵⁶ Partisipasi aktif merupakan mencakupi semua kegiatan warga negara dengan mengajukan usul tentang kebijakan umum, untuk mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pemimpin pemerintahan. Pada pihak yang lain bahwa partisipasi pasif antara lain berupa kegiatan dengan mematuhi peraturan-peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan dengan demikian saja setiap keputusan pemerintah.

Dalam buku Perbandingan Sistem Politik Indonesia yang dikutip oleh Mas'ood dan MacAndrew 1981, Almond membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, yaitu :

⁵⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992

1. Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.
2. Partisipasi politik non konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi politik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4
Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non-Konvensional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian suara 2. Diskusi politik 3. Kegiatan kampanye 4. Membentuk dan bergantung dalam kelompok kepentingan 5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan petisi 2. Berdemonstrasi 3. Konfrontasi 4. Mogok 5. Tindakan kekerasan politik harta benda (pengebonan, pembakaran) 6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)

Sumber: Almond dalam Mas'ood dan MacAndrews (1981) dikutip dari dalam buku DR. Damsar⁵⁷

Ciri-ciri sosial tertentu nampak sangat penting dalam memberikan kesempatan dan kecakapan politik kepada setiap individu. Pendidikan tinggi mempengaruhi partisipasi politik. Oleh sebab itu banyak Negara memperbaharui kurikulum sekolah untuk dapat

⁵⁷ Damsar Prof, *Op.Cit*, hlm. 186.

berpengaruh terhadap presesn sosialisasi politik kaum muda. Orang yang berstatus sosial ekonomi lebih tinggi lebih aktif. Partai politik berpengaruh besar dalam partisipasi politik. Oleh sebab itu para pengajur demokrasi partisipan agar para pembuat keputusan politik membawa permasalahan politik ketingkat masyarakat umum agar masyarakat dapat menguasai masalah dan bertindak secara politik demi kepentingan bersama.

C. Fungsi Partisipasi Politik

Sebagai suatu tindakan atau aktivitas, baik secara individual maupun kelompok, partisipasi politik memiliki beberapa fungsi. Robert Lane (Rush dan Althoff, 2005) dalam studinya tentang keterlibatan politik, menemukan empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu.

1. Sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomis.
2. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
3. Sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus.
4. Sebagai sarana untuk memenuhi keutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.⁵⁸

Dari sisi lain, Arbit Sanit (Sastroatmodjo, 1995) memandang ada tiga fungsi partisipasi politik.

⁵⁸ Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 184.

1. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.
2. Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah.
3. Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik, misalnya melalui pemogokan, huru hara, dan kudeta.⁵⁹

Partisipasi politik juga mempunyai fungsi bagi kepentingan pemerintah. Untuk kepentingan pemerintah, partisipasi politik memiliki fungsi berikut.

1. Untuk mendorong program-program pemerintah. Hal ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintah.
2. Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.
3. Sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.⁶⁰

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 184.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 184.